

Efektivitas Siklus Birokrasi Dipengaruhi Tingkat Literasi Masyarakat

Sistem demokrasi yang baik menuntut masyarakatnya memiliki kesadaran literasi yang tinggi. Negara Indonesia menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan, permusyawaratan perwakilan yang tertuang dalam butir Pancasila menjadi esensi nilai demokrasi yang dianut Indonesia. Prinsip demokrasi pada prosesnya memerlukan masyarakat yang terdidik, sadar literasi, memiliki tingkat intelektualitas yang mumpuni. Melalui kegiatan mengajar di perguruan tinggi Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berusaha membangun kesadaran literasi di kalangan mahasiswa.

Demokrasi yang ideal menuntut terbentuknya warganegara yang sadar dan paham terhadap setiap kebijakan politik dan birokrasi pemerintahan, yang bisa disebut melek politik atau literasi politik. Menurut Taufik, membangun kesadaran literasi publik penting dilakukan oleh lembaga pendidikan, karena kesadaran literasi meningkatkan kualitas demokrasi.

"Dalam demokrasi kesadaran literasi itu kan tingkat kematangan dari rakyat memilih sangat tergantung bagaimana masyarakat memahami tugas dia sebagai memilih," ujar Taufik saat memberikan materi kuliah di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (18/11/2017).

Pada kesempatan mengajar tersebut Taufik, memberikan materi kuliah tentang reformasi birokrasi. Dia menekankan efektivitas siklus birokrasi dipengaruhi tingkat literasi masyarakat. Karena literasi politik masyarakat yang tinggi memberikan keterampilan dan kemampuan memahami isu politik secara komprehensif, dengan begitu

masyarakat mampu menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Dalam materi kuliah reformasi birokrasi Watua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan, hampir semua kehidupan warga negara tersentuh dengan birokrasi. Semua kehidupan masyarakat dicampuri oleh birokrasi. Contohnya urusan administratif warga seperti surat keterangan yang diberikan otoritas pemerintahan surat izin stempel dan lain sebagainya.

Dia menjelaskan, segala macam administrasi publik tergantung pada birokrasi negara yang ahli dalam berbagai hal. Di situ letak kekuatan birokrasi, para birokrat memiliki akses informasi-informasi penting yang dimiliki negara. "Birokrasi pemerintah menguasai data informasi penting negara. Oleh sebab itu birokrasi dapat mengarahkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah," papar Taufik.

Pejabat politik negara juga sering melimpahkan kewenangan pengambilan keputusan kepada birokrasi, karena birokrat ahli dalam hal-hal teknis. Birokrat juga merupakan unsur support dalam penyusunan kebijakan publik. Taufik juga menjelaskan, keahlian dan penguasaan sumber informasi menjadi sumber kekuatan politik para birokrat, namun birokrat tidak boleh berpolitik.

Saran dari birokrat juga lebih diakui dalam proses penyusunan kebijakan karena mendorong dan mengupayakan mana yang harus dipilih. Setelah masalah diidentifikasi formulasi pemecahan masalah birokrasi memainkan peran dalam menyusun dan melancarkan proposal proposal kegiatan.

Saat mengajar Taufik fokus pada materi

akademis dan teoritis. "Kalau lagi ngajar ya saya tidak berpolitik praktis, semua akademis ilmiah. Kita harapkan bermanfaat pengalaman yang saya peroleh, saya tuangkan dan saya tularkan kepada mahasiswa doktor S III dan S II," ungkapnya.

Taufik yang juga merupakan Doktor dari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro menjalankan kegiatan mengajar sebagai panggilan jiwa, hal tersebut dia ungkapkan sesaat setelah mengajar. "Mengajar memang panggilan jiwa saya, karena dulu memang saya suka ngajar. Jadi memang dulu besic saya pernah mengajar, dan memang ada kepuasan tersendiri pada saat kita membagi ilmu kita kepada mahasiswa," paparnya.

Naluri mengajarnya memang sudah ada sejak dulu, saat menjadi mahasiswa di Undip dia pernah menjadi asisten dosen. Di kampus ini dia berkuliah mulai sejak S I, S II sampai dengan S III. Selain mengajar di Pasca Sarjana Undip dia pun mengajar di Program Studi Doktor Administrasi Publik. Baginya mengajar sebagai pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Karena perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya dalam kehidupan bangsa dan negara berperan penting dalam pembangunan negara di berbagai aspek. Melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, universitas mampu melahirkan generasi bangsa yang menentukan arah kemajuan negara. Pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi kewajiban para alumni sebagai darmabakti untuk negeri.

